

DAMPAK KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP TATA GUNA LAHAN DAN KEGIATAN EKONOMI DI JATINANGOR

Tuti Karyani

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sejak tahun 1982 pemerintah daerah Jawa Barat memindahkan beberapa perguruan tinggi (4 kampus) ke Kecamatan Jatinangor. Kebijakan ini dipertegas dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 583/SK-PIK/1989 tentang penetapan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan Jatinangor menjadi menarik bagi para pendatang yang kemudian terjadi konsentrasi penduduk.

Adanya konsentrasi penduduk tersebut karena adanya kegiatan pendidikan tinggi ini, maka dibutuhkan kegiatan penunjang untuk melayani civitas akademika. Kebutuhan kegiatan penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan pendidikan tinggi seperti pondokan/rumah sewa, bagi mahasiswa maupun rumah bagi dosen/staff perguruan tinggi, fasilitas jasa dan perdagangan, serta fasilitas lainnya.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak dibangunnya Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi terhadap perubahan tata guna lahan di Kecamatan Jatinangor.
- b. Berapa besar bangkitan kegiatan penunjang (sebagai lapangan kerja) di Jatinangor.
- c. Apakah kegiatan pendidikan tinggi tersebut dapat menarik penduduk (lokal maupun pendatang) untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan civitas akademika tersebut?
- d. Apakah keberadaan kegiatan pendidikan tinggi memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di Jatinangor?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan pada pendahuluan, studi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak dibangunnya Kawasan Pendidikan di Jatinangor terhadap perubahan tata guna lahan.
2. Mengukur kebangkitan kesempatan kerja bagi penduduk Jatinangor.
3. Mengidentifikasi kegiatan pendukung pendidikan tinggi yang dapat disediakan oleh penduduk (lokal maupun pendatang) Jatinangor.
4. Mengukur seberapa besar kontribusi kegiatan pendidikan tinggi ini terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di Jatinangor.

B. Metode Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey deskriptif. Lingkup wilayah studi ini ialah desa-desa yang berada di sepanjang Jalan Raya Jatinangor. Desa-desa dalam lingkup wilayah studi ini antara lain: 1) Desa Hegarmanah 2) Desa Cikeruh 3) Desa Cibeusi

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terhadap pe;aku kegiatan penunjang pendidikan tinggi yang ada di wilayah studi. Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari Kantor Desa dan Kecamatan, serta Bappeda Sumedang.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan ialah secara deskriptif dan tabulasi silang. Untuk menganalisis kontribusi kegiatan penunjang kegiatan pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi akan dilihat dari perolehan PDRB Kecamatan Jatinangor.

Analisis *shift-share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi suatu daerah lokal (Jatinangor) dibandingkan dengan wilayah lebih atasnya (Kabupaten Sumedang) di suatu daerah apakah menunjukkan indikasi kuat atau semakin lemah posisinya.

Pada hakekatnya analisis *shift-share* akan melengkapi data perekonomian suatu daerah dalam 4 hal, yaitu:

- a. Pertumbuhan Wilayah (*National Growth*) = (% perubahan total pendapatan per kapita) x (pendapatan per kapita lokal sektor pada (t-1))
- b. Industri Campuran (*Industrial Mix*) = (% perubahan pendapatan pada sektor - % perubahan total pendapatan per kapita) x (pendapatan per kapita sektor lokal pada (t-1))
- c. Keuntungan Kompetisi (*Competitive Share*) = (% perubahan pendapatn sektor lokal - % perubahan pada sektor) x (pendapatan per kapita sektor pada (t-1))
- d. Perubahan Total (*Total Change*) = (pertumbuhan + indistri campuran + keuntungan kompetisi)

C. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Jatinangor secara administratif terbagi dalam 12 desa dengan luas wilayah keseluruhan 26,51 km². Kebijakan provinsi yang menetapkan Jatinangor menjadi kawasan perguruan tinggi berdampak banyak perubahan penggunaan lahan besar, peruntukkan

yang tadinya berupa kawasan perkebunan, perubahan ini berpengaruh besar pada pola kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, di Jatinangor telah terjadi persaingan dalam penggunaan lahan mengingat karakteristik sumberdaya lahan yang kompleks, yaitu (1) penyediaan bersifat tetap, (2) tidak ada biaya penyediaan, (3) bersifat uni, (4) tak dapat dipindahkan, dan (5) permanen (Kiveli, 1993). Pendapat ini kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Anwar (1993) yang menyatakan bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran lahan akan menghasilkan pola tata guna lahan yang mengarah pada aktivitas paling menguntungkan yang menyebabkan harga lahan makin meningkat (Anwar, 1993).

Menurut Kustiwan (1996) faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian bisa dibagi dua, yaitu faktor internal (pertumbuhan rumah tangga pertanian dan perubahan luas penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian) dan faktor eksternal (perkembangan kawasan terbangun, pertumbuhan penduduk perkotaan, serta pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi).

1. Dampak Pembangunan Kawasan Pendidikan Tinggi di Jatinangor Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan

Tabel 1. Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan Tahun 2005

No.	Penggunaan Laha	Luas (Ha)	%
1	Pesawahan	308	12
2	Pekarangan	1.212	46
3	Tegalan/Kebun Campuran	609	23
4	Peladangan /Huma	123	3
5	Kawasan Industri	87	5
6	Kolam Perikanan	13	0,5
7	Hutan Rakyat	245	9
8	Hutan Negara	34	1
9	Penggunaan Lainnya	20	1
	Jumlah	2.651	100

Sumber: Kecamatan Jatinangor, 2006

Dari luas lahan berdasarkan penggunaannya pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lahan sawah hanya tinggal 12% dari keseluruhan luas wilayah. Adanya alih fungsi lahan sawah di kawasan Jatinangor, tentu saja berdampak pada produksi dan produktivitas hasil pertaniannya. Pada tahun 1990 kapasitas produksi padi di Jatinangor 8.101 ton dan pada tahun 2004 kapasitas produksi mencapai 5.226 ton. Dengan demikian, dalam periode 1990-2004 di Jatinangor telah kehilangan kapasitas produksi padi sawah 2.875 ton.

Beralihnya penggunaan lahan pertanian ke sektor non pertanian juga menimbulkan kerugian berupa *mubazirnya* fasilitas irigasi yang sudah dibangun dengan biaya tinggi, serta berubahkan ekosistem lingkungan yang selama ini dinilai cukup stabil. Pemanfaatan lahan sawah menjadi penggunaan lain yang cukup menonjol antara lain digunakan untuk kawasan pemukiman baru dan ruang untuk pemanfaatan campuran.

Kegiatan campuran ini antara lain perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, alat olah raga, dan alat tulis. Perkantoran, pemukiman, bahkan industri

yang berada di sepanjang koridor Jalan Raya Rancaekek dan koridor Jalan Raya Jatinangor dengan luas 123 Ha jika dihitung kiri-kanan jalan lebar 200 meter.

Proporsi pemanfaatan ruang masing-masing sektor di Kecamatan Jatinangor mengalami perubahan, terutama untuk sektor perdagangan, jasa dan kantor, dan pemukiman. Dengan kata lain, perubahan lahan sawah seluas 442 Ha di mana 123 Ha di antaranya digunakan sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran, sedangkan sisanya 137 Ha sebagian digunakan untuk membangun kawasan pemukiman baru.

Hal di atas ternyata sejalan dengan pendapat Firman (1997) yang menyatakan bahwa konversi lahan pertanian mempunyai dua konsekuensi, yaitu (1) dampak langsung terhadap hilangnya lahan pertanian penting yang mempengaruhi produksi pertanian, di mana dampak ini akan menghilangkan pekerjaan di bidang pertanian bagi petani pemilik maupun penggarap, menghilangkan investasi pada infrastruktur pertanian, serta berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan lingkungan, (2) dampak tidak langsung pada penduduk yang datang dari pusat kota ke pinggiran kota yang akan meningkatkan pembangunan perumahan dan kesempatan pekerjaan, serta akan merubah struktur sosial ekonomi di pinggiran kota. Dampak tidak langsung ini akan terlihat pada sub bab berikutnya.

2. Membangkitkan Kesempatan Kerja di Jatinangor

Sektor pertanian pada tahun 2000 merupakan lapangan kerja yang masih mendominasi di Kecamatan Jatinangor, tetapi pada tahun 2005 nampak sektor jasa lebih mendominasi. Sebaliknya untuk sektor pertanian, yang lahannya semakin menyempit akibat konversi untuk penggunaan lain, maka daya serap kerjanya juga menjadi semakin kecil. Yang muncul kemudian selain sektor jasa, yaitu sektor bangunan dan konstruksi (lihat Tabel 2)

Tabel 2. Perubahan Daya Serap Sektor Ekonomi Terhadap Tenaga Kerja Tahun 2000-2005

Mata Pencaharian	Tahun 2000		Tahun 2005	
	Jumlah (Orang)	(%)	Jumlah (Orang)	(%)
Pertanian	22.829	49,62	2.742	8,88
Industri	12.309	28,93	10.722	34,58
Bangunan & Konstruksi	-	-	44	0,14
Perdagangan, Hotel & Rest	4.215	9,16	3.650	11,75
Angkutan & Komunikasi	1.622	3,53	71	0,23
Jasa lainnya	4.035	8,77	13.822	44,51
Jumlah	46.010	100,00	31.051	100,00

Jika melihat pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang terjadi di Jatinangor, ternyata terdapat kesenjangan. Dari 40.549 orang

angkatan kerja, ternyata sebesar 30% masih merupakan pencari kerja. Bahkan untuk Desa Cibeusi antara pencari kerja dengan pekerja, lebih banyak pencari kerja.

Berdasarkan pendidikannya, pencari kerja banyak didominasi oleh lulusan SLA/MA, karena ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, pencari kerja untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi pun cukup besar.

3. Kegiatan Pendukung Perguruan Tinggi (PT) yang disediakan oleh Penduduk di Jatinangor

Dengan dibangunnya Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi, menarik dan membangkitkan kesempatan kerja dalam rangka mendukung kegiatan PT ini. Kesempatan kerja ini bervariasi seiring dengan makin berkembangnya kota Jatinangor. Hal ini disebabkan karena civitas akademika membutuhkan kegiatan penunjang yang besar, antara lain: a) Rumah dan Pondokan/rumah kontrakan, b) Kegiatan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti: 1) rumah makan (permanen) dan warung nasi (semi permanen), 2) warung kecil dan temporer (misalnya pedagang bubur ayam, bubur kacang ijo, indomie, goreng-gorengan dan warung tenda lainnya), 3) toko kelontong (yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan toko alat tulis/buku serta toko lainnya seperti toko sepatu, baju, tas, buku, dan alat tulis lainnya), b) Kegiatan yang menyediakan jasa, seperti rental komputer dan internet, foto kopi, wartel, dan rental VCD. Bahkan sekarang sudah berdiri 2 buah Mall di Jalan Raya Jatinangor yang nampaknya akan menyumbang kemacetan.

Untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai dampak kegiatan pendidikan tinggi di Jatinangor, maka diambil sampel pengusaha pondokan dan non pondokan yang ada di sepanjang jalan Raya Jatinangor yaitu Desa Cibeusi, Desa Cikeruh, dan Hegarmanah.

Sebagian besar pengusaha masih termasuk kategori muda, karena masih di bawah usia 45 tahun. Tingkat pendidikannya juga cukup baik yaitu sebagian besar sudah menyelesaikan SMA bahkan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa usia dan pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan menangkap peluang usaha. Walaupun demikian, ternyata sebagian besar peluang usaha ini ditangkap oleh penduduk dari luar Jatinangor, yang bisa dilihat asal kota dari responden yang sebagian besar berasal dari luar Jatinangor, yaitu dari Bandung, Jakarta, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, Jawa Tengah, bahkan dari Padang.

Tabel 3. Karakteristik pengusaha pondokan dan non pondokan di desa sepanjang Jl. Raya Jatinangor, 2005

Desa	Umur (tahun)		Pendidikan				Asal Kota	
	20-45	>45	S D	SM P	SM A	PT	Asli	Pindah an
Cibeusi :								
a. Pondokan	3	7	1	2	4	3	1	9

b. Non pondokan	6	-	-	-	3	3	-	5
Cikeruh :								
a. Pondokan	2	3	-	1	2	2	-	5
b. Non pondokan	13	-	-	6	3	4	3	13
Hegarmanah :								
a. Pondokan	8	12	4	6	5	5	3	17
b. Non pondokan	4	4	1	1	4	2	-	8

Dilihat dari status usahanya, maka sebagian besar usaha merupakan usaha sampingan, adapun sebagai usaha utamanya bervariasi ada yang pegawai negeri, swasta, TNI, dan pedagang. Untuk usaha pondokan (28%) yang merupakan usaha utama biasanya, karena pemiliknya pensiunan. Adapun yang menjadikan usaha mereka menjadi usaha sampingan, karena mereka masih memiliki pekerjaan lain (tambahan) baik bagi penduduk lokal maupun pendatang.

Untuk kegiatan penunjang dalam bentuk usaha toko, kios dan warung lebih banyak dijadikan sebagai pekerjaan utama (60%) . Kegiatan tersebut ternyata dapat mensubsitusi pekerjaan penduduk sebelumnya. Selain itu, mampu menarik penduduk luar Jatinangor untuk menyediakan kebutuhan civitas akademika tersebut.

Untuk pondokan rata-rata sewa kamar sederhana Rp. 150.000 per bulan sampai Rp. 800.000 per bulan. Kamar yang disewakan tersebut banyaknya bervariasi dari 2-3 kamar sampai yang 20-30 kamar untuk satu rumah yang disewakan (kost-an).

Untuk usaha non pondokan lebih hemat lahan tetapi dengan harga sewa/kontrak yang mahal. Mulai dari rata-rata Rp. 5 juta per tahun sampai Rp. 10 juta per tahun per 10 m². Sebagaimana menurut Santos (1979) bahwa usaha-usaha yang melayani aktivitas pendidikan tinggi cenderung menggunakan lahan yang kecil seperti warung makan, rental wartel, bahkan ada yang sifatnya temporer (*Require Little Space*).

Peningkatan harga sewa lahan di Jatinangor semakin membuat pemilik lahan lebih efisien menggunakan lahannya, sehingga seringkali tidak memperhatikan aturan-aturan pembangunan yang seharusnya. Pada akhirnya tata letak maupun posisi lokasi usaha menjadi semrawut dan tidak nyaman lagi.

Status kepemilikan usaha pondokan sebanyak 74% merupakan milik pribadi, dan sisanya 26% merupakan warisan orang tua atau milik keluarga. Untuk usaha non pondokan juga dilihat dari penguasaannya lebih didominasi oleh pendatang, tetapi status kepemilikannya lebih bervariasi, yaitu merupakan milik pribadi 51,85%, warisan atau milik keluarga 14,81% dan sisanya 33,33% mengontrak.

4. Penggunaan Tenaga Kerja pada Kegiatan Penunjang Perguruan Tinggi

Kegiatan penunjang perguruan tinggi memerlukan tenaga kerja, walupun untuk usaha yang skalanya kecil (mikro) jarang menggunakan tenaga kerja upahan, sebagaimana pendapat Santos (1979) bahwa salah satu ciri usaha penunjang perguruan tinggi ialah *The self Employment in Trade and Process*

(dilakukan sendiri). Hal ini karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti manajemen, capital, dan tenaga kerja, sehingga proses dan penjualan barang dan jasa dilakukan sendiri.

Untuk usaha pondokan sebagian besar mempekerjakana 1-2 orang dan biasanya sebagai pengurus rumah dan satpam. Adapun untuk usaha non pondokan yang mempekerjakan lebih dari 3 orang tenaga kerja cukup banyak, terutama untuk usaha yang skalanya cukup besar seperti toko serba ada, percetakan, dan lain-lain. Bagi usaha yang kecil, baik pondokan dan non pondokan tidak menggunakan tenaga kerja.

Dilihat dari asal tenaga kerja, usaha pondokan seringkali menggunakan tenaga kerja orang asli Jatinangor, bagi pengusaha pondokan yang domisilinya di luar Jatinangor.

Berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan ini juga, maka upah tenaga kerja pun bervariasi, yaitu antara Rp. 200.000 per bulan sampai Rp. 500.000 per bulan. Waktu bekerja untuk usaha pondokan biasanya *full day*, tetapi untuk usaha non pondokan biasanya paruh waktu, walaupun kadang-kadang harus lembur juga, terutama foto copyan dan percetakan pada waktu-waktu tertentu yaitu saat menjelang wisuda.

Peluang dan kesempatan kerja ini banyak menarik minat pada pencari kerja, bukan hanya dari penduduk asli tetapi juga dari luar. Penduduk asli tidak memiliki kualifikasi tertentu yang diperlukan lapangan pekerjaan yang ada, justru tidak bisa diserap.

5. Investasi dan Pendapatan Kegiatan Usaha Penunjang Perguruan Tinggi

Di luar biaya pembelian lahan, modal investasi pondokan pengusaha yang mengeluarkan dana Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta sebanyak 28,57%, yang mengeluarkan investasi Rp. 50 juta- Rp. 100 juta sebanyak 28,57% dan lebih dari Rp. 100 juta sebanyak 42,86%.

Untuk usaha non pondokan, modal investasinya relatif lebih sedikit dibanding usaha pondokan, karena mereka biasanya lebih menyukai mengontrak, sehingga tidak perlu uang tunai untuk membeli dan mendirikan bangunan. Masa tenggang kontrak antara 1 sampai 2 tahun, setelah itu bila dirasakan usaha ditempat tersebut nyaman dan menguntungkan, maka akan memperpanjang masa kontraknya.

Besarnya investasi sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Untuk pendapatan rata-rata per bulan sebagian besar mengaku berkisar antara Rp. 1juta sampai Rp. 5 Juta. Walaupun demikian untuk usaha pondokan, biasanya banyak menyukai pembayaran per tahun atau minimal per semester. Hal ini terjadi karena pengusaha pondokan tidak berani menanggung resiko pondokannya kosong dipertengahan waktu penerimaan mahasiswa.

Pengusaha pondokan maupun non pondokan masih memiliki sikap yang optimis dalam berusaha di Jatinangor, karena sampai saat ini persaingan masih dirasakan sebagai persaingan yang sehat serta tetap menjaga kualitas serta memahami keinginan konsumen yaitu mahasiswa.

6. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi di Jatinangor

Perubahan struktur perekonomian di suatu wilayah, bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja atau kontribusi PDRB dari setiap sektor perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk keperluan ini, maka dianalisis dengan menggunakan analisis shift-share yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisis shift-share struktur perekonomian Jatinangor 2000-2005

No.	Sektor	Growth		Industrial Mix		Competitive Share		Total Change	
		%	Nilai (Rp 'jt)	%	Nilai (Rp 'jt)	%	Nilai (Rp 'jt)	%	Nilai (Rp 'jt)
1	Pertanian	0,3	1.0942,7	-0,7	-23.823	0,5	15.671,0	-0,1	2.790,0
2	Pertambangan	0,3	0,0	0,4	0,0	-0,4	-91.616,9	0,0	44.940,4
3	Industri	0,3	79.496,9	0,2	57.060,2	-9,4	-57.687,4	-29,5	2.745,9
4	Listrik, Gas, Air	0,3	2.003,5	9,6	58.429,8	0,2	1.161,7	0,0	2.027,5
5	Bangunan/Konstruksi	0,3	2.396,0	-0,2	-1.530,1	-11,1	-970.224,7	-40,2	16.910,6
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	0,3	28.529,8	11,0	958.605,6	0,0	-90,5	0,0	1.350,3
7	Angkutan dan komunikasi	0,3	1.321,3	0,0	119,4	-6,5	87.317,1	-14,0	4.393,5
8	Keuangan	0,3	4.387,0	6,6	87.869,6	0,0	203,6	0,0	6.798,7
9	Jasa	0,3	11.072,5	-0,1	-4.477,4	-0,1	57.646,9	0,0	82.502,9

Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor di Jatinangor yang berada di atas rata-rata pertumbuhannya Sumedang ialah sektor listrik, gas, dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan dan hampir mendekati pertumbuhan Sumedang yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini sangat beralasan, karena Jatinangor dengan fasilitas tersebut merupakan fasilitas jasa penunjang kegiatan mahasiswa. Selanjutnya dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor pertanian, bangunan, dan jasa-jasa menunjukkan laju yang lebih rendah dari sektor lain, hal ini disebabkan karena kebijakan sektor tersebut kurang mendukung di wilayah ini. Untuk daya saing, sektor yang kehilangan daya saing ialah industri, listrik, perdagangan dan keuangan, hal ini dikarenakan sektor tersebut lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, kelembagaan, dan akses pasar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dampak dibangunnya Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi terhadap tata guna lahan adalah terjadinya alih fungsi lahan dari dung pertanian ke fungsi perkotaan yang merupakan kegiatan penunjang pendidikan tinggi. Lahan sawah tinggal 12% dari keseluruhan wilayah dan selama kurun waktu 1988-2004 telah terjadi penurunan luas secara kumulatid 442 Ha.
- b. Kegiatan pendidikan tinggi Jatinangor telah membangkitkan kegiatan penunjang berupa usaha pondokan dan non pondokan. Rata-rata tenaga kerja yang dapat diserap untuk 1 kegiatan antara 2-3 orang, bahkan ada yang >3 orang tenaga kerja. Selain itu, kesempatan kerja yang dibangkitkan kegiatan penunjang pendidikan tinggi ternyata menarik pencari kerja dari luar Jatinangor. Selain menarik pekerja dari luar Jatinangor, juga menarik para pemilik modal dari luar jatinangor (pendatang). Secara makro PDRB Kecamatan juga mengalami perubahan. Sektor pertanian kontribusinya rendah dan mengalami penurunan setiap tahunnya dibanding dengan sektor lainnya. Dari analisis shift share menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibanding dengan sektor di tingkat Kabupaten.

2. Saran

- a. Perlu adanya regulasi atau peraturan yang jelas dalam pengembangan kawasan pendidikan tinggi Jatinangor sampai pada tingkat yang lebih bawah, agar menjadi lebih mudah perencanaan dan pengawasannya sehingga hasilnya juga menjadi lebih tertata baik dan tidak semrawut.
- b. Agar penduduk lokal dapat bertahan untuk tetap berusaha di Jatinangor, maka lembaga perbankan lebih memberi prioritas permodalan bagi mereka. Selain itu, perlu adanya lembaga pelatihan yang memberi bekal ilmu pengetahuan bagaimana merencanakan usaha, mengajuka kredit, dan mengelola usaha secara tepat dan baik. Lembaga pelatihan ini bisa berasal dari perguruan tinggi yang berlokasi di Jatinangor, dengan demikian justru peran PT akan semakin positif bagi masyarakat lokal. Pelatihan juga perlu dilakukan untuk para pencari kerja masyarakat lokal, agar mereka dapat terserap oleh kegiatan penunjang yang muncul akibat dibangunnya kawasan pendididkan tinggi di Jatinangor.
- c. Untuk menjaga kondisi lingkungan yang seimbang, alih fungsi lahan perlu dikendalikan dengan cara mengimplementasikan RTRW Kecamatan Jatinangor secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi. 1993. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian di Sekitar Wilayah Perkotaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, No. 10/Desember.

- Firman, Tommy. 1997. *Land Conversion and Urban Development in the Northern Region in West Jawa Indonesia*, Urban Studies, University of Glasgow, Vol. 34 No.7
- Kelly, Eric Damian and Becker, Barbara. 2000. *Community Planning : An Introduction to the Comprehensive Plan*. Wasington DC. Islan Press.
- Kivell, Philip. 1993. *Land and The City: Pattern and Processes of Urban Change*, Routledge, London and New York.
- Kustiwan, Iwan. 1996. Kajian Permasalahan dan Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, Tesis pada Program Magister Pembangunan ITB.
- North, Douglass. 1995. *Location Theory and Regional Economic Growth*. Journal of Political Economy, LXIII.
- , 2006. Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 (PRODAK 2006). Kecamatan Jatinangor.
- Santos, Miltos. 1979. *The Shared Space : The Two Circuits of The Urban Economy in Underdeveloped Countries*. Methuen, London and New York.